



TESIS

Judul:

Pertanggungjawaban Pejabat Umum Dalam Penerbitan
Covernote
(Catatan Penutup) Studi Kasus Putusan Pengadilan
Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mks

Disusun oleh:
BRYANT DERIAN
NIM. 217202029

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT UMUM DALAM
PENERBITAN COVERNOTE (CATATAN PENUTUP) STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NOMOR
49/PID.SUS-TPK/2018/PT. MKS

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Bryant Derian

NIM: 217202029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2022

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI**

Nama Peserta : (lengkap tanpa gelar akademik) BRYANT DERIAN

N.I.M : 217 2020 29

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

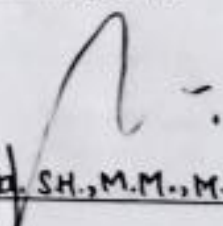
JUDUL TESIS :

Pertanggungjawaban Pejabat Umum Dalam Penerbitan Covernote
(catatan penutup) Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor 49 /Pid. sus- TPK /2018 /PT. MFS

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 3 Juli 2022

Pembimbing Tesis,


(Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., Mkn)

Pengesahan

Nama : BRYANT DERIAN
NIM : 217202029
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pejabat Umum Dalam Penerbitan
Covernote (Catatan Penutup) Studi Kasus Putusan
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus-
TPK/2018/PT.Mks
Title : Accountability of Public Officials in Issuing Covernote
(Closing Notes) Case Study of Makassar High Court
Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mks

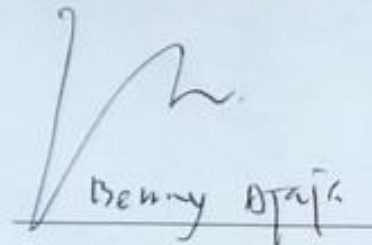
Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 21-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.

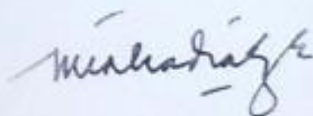
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Benny Djaja

Jakarta, 21-Juli-2022
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

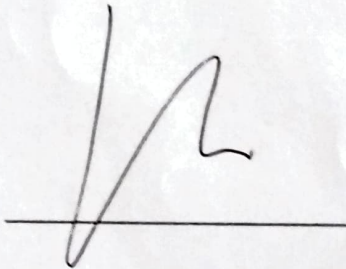
Persetujuan

Nama : BRYANT DERIAN
NIM : 217202029
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Pertanggungjawaban Pejabat Umum Dalam Penerbitan
Covernote (Catatan Penutup) Studi Kasus Putusan
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus-
TPK/2018/PT.Mks

Proposal Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 24 Juni-2022

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a smaller 'D' and 'J' that are connected. The signature is written above a solid horizontal line.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat-Nya yang berlimpah, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pejabat Umum Dalam Penerbitan *Covernote* (Catatan Penutup) Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mks**”.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk lulus dan mencapai gelar S2 (Strata Dua) Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum di Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari tahap sempurna namun Penulis mengharapkan bahwa tesis ini dapat menjadi berguna di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini, Penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Benny Djaja, S.H., M.M. M. Hum., MKn. selaku Dosen Pembimbing dari Penulis
4. Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah menyumbangkan ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung sedari awal sampai dengan diselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Seluruh Keluarga dan Teman dari Penulis

Akhir kata, Penulis hanya bisa berharap kepada Tuhan yang Maha Esa semoga Tuhan berkenan membalas seluruh kebaikan dari semua pihak yang telah membantu Penulis dan

semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Jakarta, 2 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a long, sweeping horizontal line that ends in a small upward tick.

Bryant Derian

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
TANDA PENGESAHAN TESIS UNTUK DIUJI.....	ii
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	24
3. Teori Perlindungan Hukum.....	27
4. Teori Kepastian Hukum.....	29
5. Teori Kehendak.....	33
6. Teori Pernyataan.....	33
F. Metode Penelitian.....	35
1. Pendekatan Metode Penelitian: Yuridis Normatif	35

2. Spesifikasi Penelitian: Deskriptif Analisis	38
3. Jenis dan Sumber Data.....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Tinjauan Umum Notaris.....	41
1. Sejarah Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia.....	41
2. Pengertian Notaris.....	43
3. Kewenangan Notaris.....	43
4. Kewajiban Notaris.....	46
5. Larangan Notaris.....	49
6. Syarat Menjadi Notaris.....	52
7. Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	52
B. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	58
C. Teori Perlindungan Hukum.....	59
D. Teori Perjanjian.....	63
E. Teori Kehendak.....	65
F. Teori Pernyataan.....	68
G. Teori Kepastian Hukum.....	70
H. Perbuatan Melawan Hukum.....	71
I. Tindak Pidana Korupsi.....	73
J. Perbankan/SKMHT dan APHT.....	74
K. <i>Covernote</i> dan <i>Living Law</i>	77
BAB III HASIL PENELITIAN.....	87
A. Kasus Putusan Pengadilan Makassar.....	87
B. Hasil Wawancara.....	108

BAB IV HASIL ANALISIS DATA.....	110
A. Kekuatan Hukum <i>Covernote</i> yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum.....	110
B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan <i>Covernote</i>	127
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	150
DAFTAR LAMPIRAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Covernote adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Notaris yang berisi suatu pernyataan atau keterangan Notaris yang menyebutkan atau menguraikan bahwa tindakan hukum tertentu para pihak/penghadap untuk Akta tertentu yang telah dilakukan di hadapan Notaris. Sebagai kebiasaan hukum atau *living law*, *covernote* harus mengandung 3 (tiga) aspek yaitu formal, materil, dan lahiriah. Bank meminta pembuatan *covernote* kepada Notaris dikarenakan kepentingan internalnya yaitu sebagai dasar untuk mencairkan kredit, audit internal, pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan waktu agar dapat diawasi. Dalam studi kasus pembuatan *covernote* di Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MKS, menjelaskan pada tanggal 14 November 2009 Aming Gozal selaku Direktur PT. GMG mengajukan kredit investasi kepada PT. BNI SKC Parepare untuk keperluan tambahan modal kerja Departemen Store dan kredit investasi untuk keperluan renovasi Mall of Makassar. PT. BNI SKC Parepare mendatangi Notaris/PPAT dengan surat untuk meminta bantuan kepada Notaris/PPAT, PT. GMG dan PT. BNI SKC Parepare menyerahkan surat-surat atau akta-akta yang diperlukan agar dapat diproses oleh Notaris/PPAT dan Notaris/PPAT membuat keterangan yang disebut *covernote* yang isinya menerangkan hal-hal yang akan ditandatangani. Identifikasi masalah yang terdapat dalam putusan ini adalah mengenai kekuatan hukum dan pertanggungjawaban pejabat umum terhadap *covernote* yang dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analisis, sedangkan hasil penelitian akan menjelaskan fakta atau kasus posisi, dakwaan, banding, amar putusan, dan data hasil wawancara.

Kata Kunci: *Covernote*, Notaris, Kreditur dan Debitur

ABSTRACT

Covernote is a custom made by a Notary that contains a statement or statement of a Notary that mentions or describes that certain legal actions of the parties/appearers for certain Deeds have been carried out before the Notary. As a legal habit or living law, covernotes must contain 3 (three) aspects, namely formal, material, and outward. Banks request a covernote to a Notary because of their internal interests, namely as a basis for disbursing credit, internal audits, work that requires time to be monitored. In the case study of making covernotes in the Makassar High Court Decision Number 49/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MKS, explained on November 14, 2009 Aming Gozal as Director of PT. GMG applied for investment credit to PT. BNI SKC Parepare for additional working capital for the Store Department and investment credit for the renovation of the Mall of Makassar. PT. BNI SKC Parepare came to the Notary/PPAT with a letter to ask for help from the Notary/PPAT, PT. GMG and PT. BNI SKC Parepare submits the necessary letters or deeds so that they can be processed by a Notary/PPAT and a Notary/PPAT makes a statement called a covernote, which explains the things to be signed. The identification of the problems contained in this decision is regarding the legal force and the accountability of public officials to the covernotes issued. The research method used is a normative juridical approach and descriptive analysis, while the results of the study will explain the facts or cases of positions, indictments, appeals, decisions, and data from interviews.

Keywords: Covernote, Notary, Creditors and Debtors

DAFTAR SINGKATAN

APHT	adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan
BNI Makassar	adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Makassar
BPKP	adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPN	adalah Badan Pertanahan Nasional
PT. BNI SKC Parepare	adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentral Kredit Kecil Parepare
Perusda Sulsel	adalah Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
PT. GMG	adalah PT. Griya Maricaya Gemilang
HGB	adalah Hak Guna Bangunan
INI	adalah Ikatan Notaris Indonesia
PPAT	adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
PP 24/1997	adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Tanah
PP 24/2016	adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
PP 40/1996	adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
PP 37/1998	adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah
PP 10/1961	adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
KUHAP	adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

	Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata
SHGB	adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan
SKMHT	adalah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
KUHP	adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU Rumah Susun	adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
UUJN	adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UUJN-P	adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
UU Perbankan	adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UUD 1945	adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945